

Dampak Covid 19 Terhadap Tingkat Kemiskinan Pedesaan Dan Perkotaan Di Provinsi Lampung

Anas Malik^{1*}, Siti Zulaikha², Yusuf Zaini Aprizal³

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Metro Indonesia

³Universitas Jambi Indonesia

Korespondensi: anasmalik@radenintan.ac.id *

Received: 18/01/2023

Revised: 24/03/2023

Accepted: 31/03/2023

Abstract

The World Health Group's Global Health Regulation Emergency Committee on January 30, 2020 reported that the coronavirus outbreak was a "Public Health Emergency of International Concern" (PHEIC). The government in this case, the Ministry of Health issued a decree of the Minister of Health No. HK. 01. 07/MENKES/ 413/ 2020 concerning the Principles of Prevention and Control of Coronavirus Disease 2019. The impact of Covid 19 resulted in the decline in the economy in Lampung Province in 2020 contracting by 1.67 percent, the lowest in the last 10 years and having an impact on the increase in the population of 41,820 during the Covid 19 pandemic. The purpose of this study is to see the direct impact on poverty levels in urban and rural areas. This research is qualitative descriptive.using BPS data from 2019-2021 during the Covid 19 period. The data analysis used is qualitative information analysis with inductive thinking methods, because the information obtained is in the form of information in the structure of understanding. The result of this study is The impact of the Covid-19 outbreak caused by the SARS-CoV-2 virus during the pandemic in semester 1 of 2019 the urban poverty rate of 8.92% rose in semester 1 of 2021 to 9.29%, while in rural areas the poverty rate was 14.27 to 14.18 in semester 1 of 2021. Although the poverty rate remains greater in rural areas, the increase in urban poverty rates has increased. This shows that Covid 19 has greatly impacted urban residents with the implementation of PPKM, the wheels of the urban community's economy are hampered.

Keywords: Covid 19 pandemic; Pandemic Impact; poverty level;

Abstrak

Komite Darurat Peraturan Kesehatan Global dari Kelompok Kesehatan Dunia pada tanggal 30 Januari tahun 2020 melaporkan bahwa wabah virus corona "Darurat Kesehatan Masyarakat yang jadi Perhatian Internasional" (PHEIC). Pemerintah dalam ini kasus ini, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat ketetapan Menteri Kesehatan No. HK. 01. 07/ MENKES/ 413/ 2020 mengenai Prinsip Pencegahan Serta Pengendalian Coronavirus Disease 2019. Dampak dari adanya Covid 19 ini berakibat pada menurunnya perekonomian di Provinsi Lampung di Tahun 2020 berkontraksi sebesar 1,67 persen, paling rendah dalam 10 tahun terakhir dan berdampak kepada kenaikan kemiskinan sebesar 41.820 selama pandemic covid 19. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat dampak secara

langsung terhadap tingkat kemiskinan yang ada di perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan data BPS dari tahun 2019-2021 selama masa Covid 19. Analisa data yang dipakai merupakan analisa informasi kualitatif dengan metode berfikir induktif, sebab informasi yang didapat berbentuk keterangan-keterangan dalam struktur pemahaman. Hasil dari penelitian ini adalah Dampak dari adanya wabah Covid 19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 selama pandemi di semester 1 tahun 2019 tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 8.92% naik di semester 1 tahun 2021 menjadi 9.29% sedangkan di pedesaan tingkat kemiskinan sebesar 14.27 menjadi 14.18 di semester 1 tahun 2021. Walaupun tingkat kemiskinan tetap lebih besar yang berada di pedesaan tetapi peningkatan tingkat kemiskinan di perkotaan mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwasanya Covid 19 sangat berdampak kepada penduduk perkotaan dengan adanya pemberlakuan PPKM roda perekonomian masyarakat perkotaan terhambat.

Kata Kunci: Pandemi Covid 19; Dampak Pandemi; Tingkat Kemiskinan;

PENDAHULUAN

Virus Corona sudah dikenal dari tahun 1930-an dan diketahui ada pada fauna. Pada tahun 2002, muncul penyakit terbaru golongan Virus Corona yang memunculkan penyakit "*Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS)". Pada tahun 2012, timbul lagi jenis Virus Corona ini yang memunculkan penyakit "*Middle East Respiratory Syndrome* (MERS)" di Timur Tengah (Sutaryo, 2020). Sedangkan, COVID-19 (*Coronavirus Disease 2019*) adalah penyakit yang dapat menular di sebabkan oleh SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*). Penyakit ini ialah tipe terkini yang belum sempat teridentifikasi sebelumnya pada manusia.

Ada setidaknya Dua jenis Virus Corona yang diketahui memunculkan penyakit yang dapat menimbulkan tanda-tanda berat sejenis MERS (Middle East Respiratory) dan SARS (Severe Respiratory Syndrome). Pertanda pada umumnya peradangan Covid 19 merupakan kendala respirasi kronis semacam batu berdahak, meriang, serta sesak napas sementara itu masa inkubasi pada umumnya 5-6 hari dengan waktu inkubasi terpanjang 14 hari. (Kemenkes RI, 2020)

Memasuki tahun baru 2020, Dunia di gemparkan oleh peristiwa pandemic yang menginfeksi penyebab yang belum dikenal. Awal mula di dasarkan dalam informasi dari Tiongkok kepada World Health Organization adanya 44 penderita dengan pertanda pneumonia berat di kota wuhan, Provinsi Hubei. Yang terjadi persisnya dalam akhir tahun 2019. Dalam 10 Januari 2020 faktornya mulai teridentifikasi serta di miliki petunjuk genetiknya ialah virus corona baru, asumsi mula terjalin di pasar bawah yang menjual ikan, binatang laut serta lainnya. (Diah Handayani, 2020). Di Tahun 2020 Bulan Desember di Kota Wuhan, Cina, terjadi kejadian luar biasa (KLB) permasalahan pada radang alat pernapasan (pneumonia) yang diakibatkan dari jenis Coronavirus, namun Coronavirus ini belum sempat diketahui lebih dahulu, alhasil diucap selaku Corona tipe terkini ataupun Roman Coronavirus). Pada 11 Februari 2020, World Health Organization dengan metode sah memublikasikan penyebutan terkini virus pemicu pneumonia

misterius itu dengan julukan "Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus- 2(SARS- CoV- 2) " dan julukan penyakit yang ditimbulkannya ialah COVID- 19 (Coronavirus Disease 2019).(Diah handayani. 2020)

CDC menanggapi wabah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus corona novel(terkini) yang mula kali ditemui di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina dan yang dikala ini telah ditemui di 50 lokasi di bumi, termasuk sekian banyak kasus di Amerika Serikat. Virus itu diberi julukan" SARS- CoV- 2" dan penyakit yang disebabkan nya disebut" penyakit virus corona 2019"(disingkat" COVID- 19").(Wang Zhou. 2020)

Awal mula penyebaran virus corona di Indonesia bermula ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari warga negara jepang pada tanggal 2 maret 2020. Siklus penyebaran Covid 19 yang terjadi di Indonesia berkembang dengan sangat pesat hingga menjangkau 34 Provinsi di Indonesia. Kasus positif covid 19 pertama di wilayah lampung terkonfirmasi untuk pertamaka kali di tanggal 19 Maret 2020. Pasien kontak secara langsung dengan penderita Covid 19 dalam kegiatan seminar keagamaan Di kota bogor pada tanggal 25-28 Februari 2020. Sejak awal kehadirannya, covid19 di hadapai dengan percaya-tidak-percaya oleh warga dunia. Baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini terekam dengan kebijakan pemerintah Tiongkok yang cenderung menutup-nutupi diawal wabah terdeteksi. (Sudarman. 2021)

Pemerintah dalam ini kasus ini, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat ketetapan Menteri Kesehatan No. HK. 01. 07/ MENKES/ 413/ 2020 mengenai Prinsip Pencegahan Serta Pengendalian Coronavirus Disease 2019. Perturan Menteri Kesehatan tersebut menjadi acuan pencegahan dan pengendalian Covid-19 bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, Kota dan Kabupaten. (Kemenkes.2021)Dampak Covid 19 di provinsi Lampung bukan hanya semata berdampak kepada kesehatan tetapi berdampak lebih jauh kepada aspek Sosial dan Ekonomi. Banyak perusahaan mem PHK karyawan akibat dari turunya tingkat konsumsi masyarakat sehingga berdampak kepada kelangsungan perekonomian yang ada di provinsi lampung dan berakibat secara langsung kepada kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2020 berkontraksi sebesar 1,67 persen, paling rendah dalam 10 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini.

Tabel.1 : Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha

Tahun	Q1	Q2	Q3	Q4
2017	5,12	5,03	5,21	5,30
2018	5,08	5,35	5,19	5,60
2019	5,19	5,60	5,14	5,11
2020	-3,58	1,74	-2,41	-2,26

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Melihat data diatas, pertumbuhan perekonomian di provinsi lampung mengalami kontraksi yang cukup dalam pada kuartal pertama tahun 2020 sebesar -3,58. awal mula dari pengumuman adanya kasus pertama ini lah pemerintah provinsi Lampung melakukan *social distancing* dalam skala besar dengan diliburkan sekolah dan kampus, pengetatan pusat perbelanjaan dan aktifitas work from home bagi perkantoran dan perusahaan swasta yang berakibat adanya daya beli masyarakat Selama pandemi covid 19 perekonomian lampung. Tumbuh -1.67% lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar -2.07% tetapi tetap membawa dampak terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Lampung.

Shirazi dan Pramanik berkata kemiskinan didefinisikan sebagai sesuatu situasi yang dialami oleh seseorang individu dimana mereka tidak memiliki berkecukupan sumber daya buat penuhi keinginan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari faktor ekonomi, sosial, intelektual, atau sudut pandang spiritual.(Irfan Syaqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti. 2017)

Muttaqien(2006: 3) menyatakan, kalau kemiskinan memunculkan akibat yang nyaris serupa di semua negara. Kemiskinan memunculkan:(1) Lenyapnya keselamatan untuk golongan miskin(pakaian, pangan, kediaman),(2) Lenyapnya hak hendak pendidikan,(3) Lenyapnya hak hendak kesehatan,(4) Tersingkirnya dari pekerjaan yang pantas selaku kemanusiaan,(5) Termarjinalkannya dari hak atas perlindungan hukum,(6) Lenyapnya hak atas rasa aman,(7) Lenyapnya hak atas partisipasi pada penguasa dan ketetapan khalayak,(8) Lenyapnya hak atas kejiwaan,(9) Lenyapnya hak untuk pembaruan, dan(10) Lenyapnya hak atas kedaulatan hidup.(Lincoln Asyad. 2016)

Tabel 2 : Jumlah Penduduk Miskin 2019-2020

Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			
2019		2020	
Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)	Semester 1 (Maret)	Semester 2 (September)
1 063,66	1 041,48	1 049,32	1 091,14

Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2021

Berdasarkan data diatas, antara sebelum dan masa pandemic covid 19. Sebelum masa pademi covid 19 semester kedua di tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebesar 1.049,320 dan masa pandemic di semester yang sama tahun 2020 tingkat kemiskinan sebesar 1.091,140 mengalami kenaikan sebesar 41.820 selama pandemic covid 19. Tujuan di penelitian ini untuk mengurai dampak Covid 19 terhadap tingkat kemiskinan yang ada di perkotaan dan pedesaan. Maka menarik untuk dikaji permasalahan covid 19 yang mempunyai dampak terhadap tingkat kemiskinan di pedesaan maupun di perkotaan di provinsi lampung

METODE PENELITIAN

Dalam mengukur kemiskinan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik memakai rancangan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Pada pendekatan ini, kemiskinan diukur sebagai ketidakmampuan di faktor ekonomi penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan serta bukan makanan yang diukur dengan pengeluaran masyarakat. (<https://lampung.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html.2021>). Riset ini bersifat deskriptif kualitatif. dengan memakai data BPS dari tahun 2019- 2021 sepanjang era Covid 19. Analisa data yang dipakai merupakan analisa informasi kualitatif dengan metode berfikir induktif, sebab informasi yang didapat berbentuk keterangan- keterangan dalam struktur pemahaman. Kualitatif merupakan metode riset yang menghasilkan informasi deskriptif yakni sumber dari tertulis ataupun pernyataan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia. (Burhan Ahafa. 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2020, berdasarkan hasil sensus penduduk 2020 bahwasanya penduduk di provinsi Lampung sebanyak 9 juta jiwa atau sekitar 15.38 persen dari seluruh penduduk Sumatera. Berdasarkan tingkat kabupaten atau kota di provinsi Lampung, jumlah penduduk terbesar berada di kabupaten Lampung Tengah memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.460 Juta Jiwa, selanjutnya Kota Bandar Lampung sebanyak 1.166 juta jiwa, Kabupaten Lampung Timur 1.110 juta jiwa dan kabupaten Lampung Selatan sebanyak 1.064 juta. (BPS.2020)

Tabel 3: Jumlah Penduduk Provinsi Lampung

Kabupaten	Jumlah Penduduk	Distribusi (Persen)
1	2	3
Kabupaten	302139	3.35
Lampung Barat	640275	7.11
Tanggamus	1064301	11.82
Lampung Selatan	1110340	12.33
Lampung Timur	1460045	16.21
Lampung Utara	633099	7.03
Waykanan	473575	5.26
Tulang Bawang	430021	4.77
Pesawaran	477468	5.3
Pringsewu	405466	4.5
Mesuji	227518	2.53
Tulang Bawang Barat	286162	3.18
Pesisir Barat	162697	1.81
Bandar Lampung	1166066	12.95

Metro	168676	1.87
Provinsi Lampung	9007848	100

Sumber.Sensus Penduduk 2020 (BPS)

Pandemic Covi-19 sejak tahun 2019 hingga saat ini telah menjadi wabah secara global dan berdampak pada pola kehidupan manusia. Pembatasan sosial dan vaksinasi menjadi solusi dalam menghambat peredaran covid 19. Berikut rincian kasus Covid 19 pada tahun 2021.

Tabel 4: Rincian Kasus Covid 19 Per Wilayah Tahun 2021

Kabupaten	Positif	Sembuh	Meninggal
1	2	3	4
Lampung Tengah	4550	3959	582
Lampung Barat	2922	2675	138
Tanggamus	2549	2410	336
Lampung Selatan	4605	4341	264
Lampung Timur	5909	5317	578
Lampung Utara	3954	3528	176
Waykanan	868	800	68
Tulang Bawang	718	630	87
Pesawaran	2654	2419	233
Pringsewu	4027	3690	336
Mesuji	571	515	57
Tulang Bawang Barat	1194	1053	141
Pesisir Barat	924	880	44
Bandar Lampung	11384	10577	798
Metro	2932	2748	184
Provinsi Lampung	49761	45542	4022

Sumber: Data diolah. <https://covid19.lampungprov.go.id>

Dengan melonjaknya Covid 19 di tahun 2021. Pemberlakuan Pembatasan Aktivitas Warga yang disebut dengan PPKM ialah salah satu kebijakan Pemerintah Republik Indonesia guna melawan pandemi Covid- 19 yang sebelumnya, pemerintah pernah menetapkan peraturan Pembatasan Social Berskala Besar(PSBB) yang berjalan di sebagian daerah di Indonesia. Hal ini dilaksanakan sebab terdapatnya inisiatif dari pemerintah daerah. Dari sebutan itu, tiap- tiap PPKM ada parameter pembeda yang dirincikan alhasil bisa jadi referensi pengendalian wilayah dalam membatasi aktivitas warga. PPKM yang sangat berakibat kepada UMKM serta masyarakat kecil adalah PPKM Darurat yang berlaku pada 3 Juli- 25 Juli 2021, dimana PPKM ini menetapkan pengurangan peningkatan kasus konfirmasi setiap hari sampai di bawah 10 ribu kasus per harinya. Adapun pengetatan yang diberlakukan antara lain

dalam pusat perbelanjaan atau plaza atau pusat perdagangan wajib ditutup; restoran serta rumah makan tidak menerima makan di tempat; setelah itu tempat ibadah tidak diizinkan menyelenggarakan ibadah dengan cara berjamaah, serta lain- lain. Terdapatnya kebijakan pengetatan itu pastinya berakibat dalam situasi ekonomi.([www. djkn. kemenkeu. go. id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id))

2. Penduduk Miskin

Menurut World Bank(2008) mengambil keputusan standar kemiskinan berdasarkan pemasukan per jiwa. Masyarakat yang pemasukan per kapitanya kurang dari sepertiga rata- datar pemasukan perkapita nasional. Dalam situasi itu, alhasil rasio kemiskinan untuk World Bank ialah USD\$2 per orang per hari. Bagi Badan Pusat Statistik(2013), determinasi perhitungan garis kemiskinan pada penduduk adalah sebesar Rp. 273. 231 perkapita per bulan yang berasal dari perhitungan garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan. Untuk keinginan paling kecil makanan dipakai barometer 2. 100 kilokalori per jiwa per hari. Untuk pengeluaran kebutuhan sangat sedikit bukan santapan melingkupi pengeluaran buat perumahan, pendidikan, dan kesehatan.

Dampak dari adanya Covid secara langsung dirasakan oleh masyarakat dengan berlakunya PPKM maka perekonomian akan terganggu terutama pelaku UMKM. Hal ini menjadi pemicu tingkat kemiskinan semakin meningkat. Pada mengukur kemiskinan yang dilakukan oleh BPS memakai rancangan kemampuan penduduk untuk penuhi berbagai keperluan dasar (basic needs approach). Pada pendekatan ini, kemiskinan diukur sebagai ketidakmampuan masyarakat dari di sisi ekonomi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar makanan serta bukan makanan yang diukur melalui pengeluaran masyarakat.

<https://lampung.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>).

Tabel 5:

Presentase Jumlah Penduduk Miskin berdasarkan Perkotaan dan Pedesaan						
Tahun	Jumlah Penduduk Miskin			Presentasi Kenaikan		
	Perkotaan	Pedesaan	Jumlah	Perkotaan	Pedesaan	
Smt I 2019	23186	83180	106366	8.92	14.27	
Smt II 2019	22469	81679	104148	8.6	13.96	
Smt I 2020	23710	81222	104932	9.02	13.83	
Smt II 2020	25928	83186	109114	9.59	14.22	
Smt I 2021	25460	82933	108393	9.29	14.18	

Sumber: BPS.Data diolah 2021

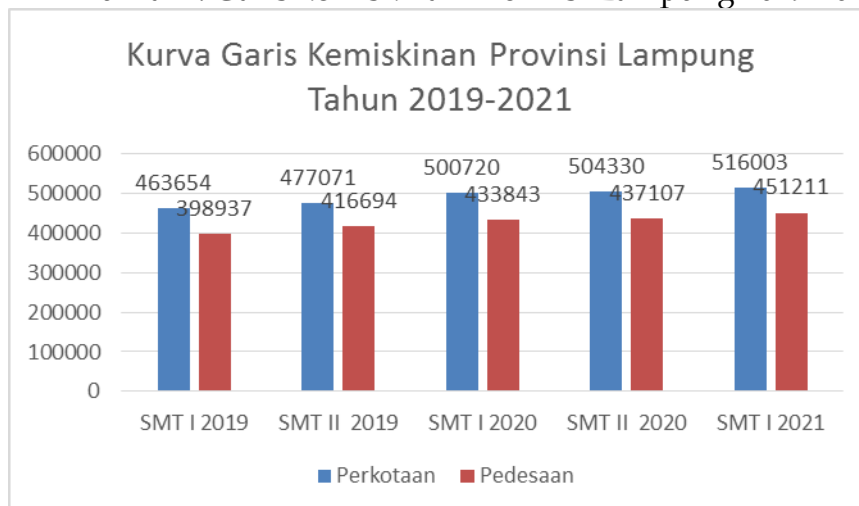
Penduduk miskin di provinsi lampung mengalami peningkatan tertinggi selama covid 19 di Semester II tahun 2020 sebesar 23.81% sebanyak 109.114

Jiwa. baik diperkotaan dan pedesaan penduduk miskin mengalami peningkatan. peningkatan penduduk miskin perkotaan meningkat sebesar 9.59% (25928) sedangkan penduduk miskin di pedesaan sebesar 14.22% (109114).

3. Garis kemiskinan Provinsi Lampung di Tahun 2019-2021

Badan Pusat Statistik mengeluarkan data mengenai Garis Kekurangan (GK) ialah akumulasi dari Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) serta Garis Kemiskinan Makanan (GKM). Masyarakat yang mempunyai rata-rata pengeluaran per jiwa per bulan di dasar Garis Kekurangan dikategorikan selaku masyarakat miskin. Besar kecilnya jumlah masyarakat miskin di perkotaan atau di desa sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan. Garis kemiskinan, di provinsi lampung dapat dilihat dibawah ini.

Kurva 1 : Garis kemiskinan Provinsi Lampung 2019-2021



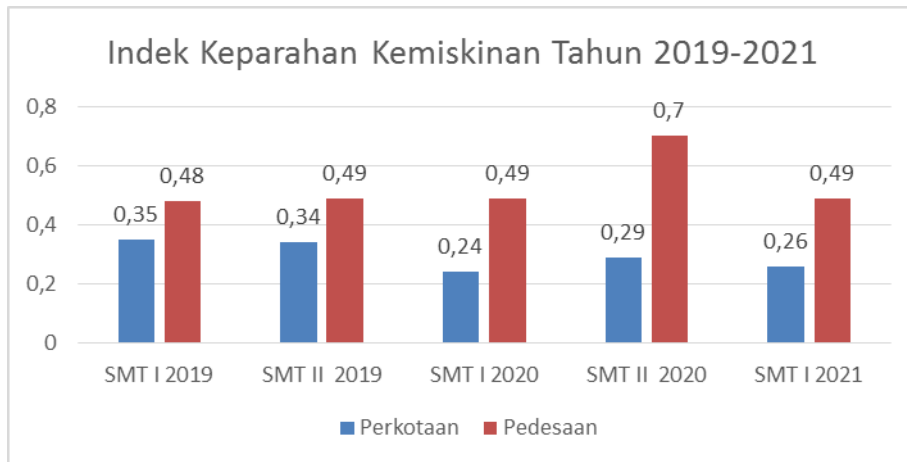
Sumber: BPS Provinsi Lampung 2021

Di semester I tahun 2021 garis kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami peningkatan tertinggi sebanyak 516003 garis kemiskinan yang berada di perkotaan. Sedangkan sebanyak 451211 jiwa berada pada pedesaan. Bersumber pada publikasi (WorldBank, 2021) yang melaporkan bahwasannya 4 dari 5 orang ada di dasar garis kekurangan, biasanya mereka tinggal di daerah (<https://www.worldbank.org.2021>)

4. Indeks Keperahan Kemiskinan

Sedangkan untuk melihat gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antar penduduk miskin disebut sebagai Indeks Keperahan Kemiskinan. Semakin tinggi nilai dari indeks keparahan kemiskinan maka ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin akan semakin tinggi.

Kurva 2: Indek Keperahan kemiskinan tahun 2019-2021



Sumber: Data BPS.diolah 2021

Indeks keparahan kemiskinan diperkotaan relatif semakin menurun, sedangkan di pedesaan di semester II tahun 2020 mengalami peningkatan signifikan sebesar 0.7 hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin tinggi.

5. Indek kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.

Tabel 7: Indek Kedalaman kemiskinan Provinsi Lampung

Indeks kedalaman kemiskinan P1			
Wilayah	2019 (Persen)	2020 (Persen)	2021 (Persen)
Provinsi Lampung	1.93	1.9	1.88

Sumber: Data BPS 2020

Indeks kedalaman kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan artinya Turunnya indeks kedalaman kemiskinan itu membuktikan kalau koreksi ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah di era endemi Covid-19 telah sesuai jalurnya maka sanggup kurangi kesenjangan masyarakat miskin dari garis kemiskinan(GK).

6. Indeks Gini Ratio

Permasalahan besar yang biasanya dialami oleh negara- negara berkembang termasuk Indonesia merupakan kesenjangan ekonomi ataupun kesenjangan pada penyaluran pendapatan antara golongan penduduk berpendapatan besar serta golongan penduduk berpendapatan kecil dan tingkatan kekurangan ataupun jumlah orang ada di dasar garis kemiskinan(

poverty line).(T. Tambunan. 2001). Nilai Gini Rasio yang mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. (Rosyita Darojati A'laa dan Sutikno.2018)

Tabel 6: Indek Gini Ratio Provinsi Lampung 2019-2021

Bulan (Semester) (Semester)	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan + Pedesaan		
	Gini Ratio			Gini Ratio			Gini Ratio		
	2021	2020	2019	2021	2020	2019	2021	2020	2019
Maret	0.35	0.345	0.35	0.29	0.298	0.29	0.32	0.327	0.33
September	-	0.342	0.35	-	0.295	0.29	-	0.32	0.33

Sumber: Data BPS. 2021

Berdasarkan data BPS, ratio gini perkotaan dan pedesaan di provinsi lampung relatif turun. Kesenjangan mesti mendapat perhatian sebab kesenjangan wilayah yang ekstrim menimbulkan inefisiensi ekonomi, distribusi aset yang tidak sesuai serta menaikkan jumlah kemiskinan, inefisiensi, melemahkan stabilitas sosial serta simpati dan memperkuat kekuatan politik pihak kaya sehingga memunculkan ketidakadilan untuk warga.(Meter. P. Todaro and S. C. Smith. 2004)

7. Dampak Covid Terhadap kemiskinan Di lampung

Berdasarkan hasil survei sosial demografi dampak covid yang dilakukan oleh BPS Provinsi lampung yang terdiri dari 1407 responden . Dampak Covid 19 terhadap pendapatan yang bekerja berjumlah 79.81 persen dari keseluruhan responden yang ada, menunjukkan bahwa responden yang mengaku mengalami penurunan pendapatan sebanyak 45.05 persen. tidak mengalami perubahan pendapatan sebesar 54.23 persen. hanya sekitar 0.71 yang mengalami kenaikan pendapatan. Sebanyak 49.85 persen responden laki-laki dan 37.47 responden perempuan mengalami penurunan pendapatan. (BPS Provinsi Lampung.2020). Dampak dari adanya penurunan pendapatan akan mempengaruhi penurunan daya beli masyarakat yang semakin rendah. wabah Covid- 19 yang berakibat pada transformasi sikap serta kegiatan ekonomi telah mendorong peningkatan jumlah dan angka kemiskinan, baik secara nasional, wilayah desa- kota, ataupun secara pulau- provinsi.(Endang Siti Rahayu serta Arbianti. 2021)

Angka kemiskinan di Provinsi Lampung membuktikan eskalasi sepanjang pandemi Covid- 19. Data Badan Pusat Statistik(BPS) mencatat jumlah masyarakat miskin Lampung saat sebelum pandemi dalam September 2019 berjumlah 1. 041. 480 jiwa ataupun 12, 3 Persen dari keseluruhan masyarakat. Akan tetapi, pada Maret 2020 angkanya bertambah jadi 1. 049. 320 jiwa(12, 34 Persen). Namun, pada Maret 2021 masyarakat usia kerja yang terdampak Covid- 19 turun jadi tinggal 340, 3 ribu jiwa(5, 28 Persen). Kucuran dana Bantuan Langsung Tunai(BLT) serta membaiknya angka tukar petani membuat jumlah masyarakat miskin di Lampung menurun di triwulan awal tahun 2021.(Agus Kurniawan. [https:// databoks. katadata. co. id](https://databoks.katadata.co.id). 2021)

Pemerintah provinsi Lampung dalam menghadapi Covid-19 telah merumuskan beberapa kebijakan yang harus dilaksanakan, pertama. Kepastian dalam menerapkan refocusing anggaran sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku. *Kedua*, Penggunaan anggaran Kesehatan secara cepat dan tepat, Khususnya dalam menyediakan alat Kesehatan, perlindungan tenaga Kesehatan dan peningkatan kapasitas pada rumah sakit rujukan. *Ketiga*, Kelompok Masyarakat yang ekonomi paling rentan menjadi prioritas dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan menyediakan program-program bantuan sosial seperti PKH, BPNT, Pra Kerja, KIS, penanggulangan beban kredit masyarakat. Keempat, kepastian keberlangsungan operasional dan insentif usaha pada sektor yang paling terdampak. Kelima. Harmonisasi dan sinergisitas antar Lembaga pemerintah pusat, provinsi, kota atau kabupaten dalam melaksanakan penyesuaian ulang (re-arrangement) terhadap anggaran dan belanja pembangunan penanggulangan Covid-19 dapat berjalan secara produktif dan optimal sesuai sasaran. *Keenam*. Menjaga stabilitas dan membangun penguatan keyakinan masyarakat terhadap kinerja ekonomi melalui Analisa yang mendalam dan mengevaluasi kebijakan dampak Covid-19 terhadap perekonomian dari waktu ke waktu. (bappeda.lampungprov.go.id) wabah korona ini banyak menyerang warga perkotaan.

Sedangkan itu masyarakat yang terdapat di wilayah rural tidak berhadapan dengan yang namanya wabah Corona. Sebab itu banyak pihak yang mengatakan bahwa yang namanya wabah Corona ini sesungguhnya merupakan wabah yang tertuju buat masyarakat kota. Perkaranya apa yang terjalin dengan masyarakat kota alhasil kemudian wabah ini tampaknya layak untuk berada di dalam wilayah perkotaan serta setelah itu melanda masyarakat perkotaan itu. wabah bukan saja melanda kesehatan warganya, namun pula menyerang kesehatan ekonominya. Jika ekonomi perkotaan jadi tersendat selaku akibat dari terganggunya kemajuan kota sehingga akan memunculkan permasalahan serius. Jika masyarakat di wilayah desa tidak mempunyai uang sehingga mereka dapat memakai hasil perkebunannya selaku basis makanan ataupun selaku alat tukar dengan benda yang lain, serta mudah untuk masyarakat di desa, bisa makan seperlunya begitu juga yang telah mereka lakukan sepanjang ini. (IB Ajaran Raja. 2020)

KESIMPULAN

Dampak dari adanya wabah Covid 19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 selama pandemi di semester 1 tahun 2019 tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 8.92% naik di semester 1 tahun 2021 menjadi 9.29% sedangkan di pedesaan tingkat kemiskinan sebesar 14.27 menjadi 14.18 di semester 1 tahun 2021. Walaupun tingkat kemiskinan tetap lebih besar yang berada di pedesaan tetapi peningkatan tingkat kemiskinan di perkotaan mengalami kenaikan. Ini menunjukkan bahwasanya Covid 19 sangat berdampak kepada penduduk perkotaan dengan adanya pemberlakuan PPKM roda perekonomian masyarakat perkotaan terhambat. Dampak Covid 19 di provinsi Lampung bukan hanya semata berdampak kepada kesehatan tetapi berdampak

lebih jauh kepada aspek Sosial dan Ekonomi. Banyak perusahaan mem PHK karyawan akibat dari turunya tingkat konsumsi masyarakat sehingga berdampak kepada kelangsungan perekonomian yang ada di provinsi lampung dan berakibat secara langsung kepada kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perekonomian Provinsi Lampung Tahun 2020 terkontraksi sebesar 1,67 persen, paling rendah dalam 10 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih diucapkan diucapkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyajian data dan kepada pengelola jurnal karena telah membantu dalam penerbitan jurnal.

KONTRIBUSI PENULIS

Dalam penulisan artikel ini setiap penulis dari berbagai afiliasi memberikan kontribusinya mulai dari pencarian data sampai penerbitan pada jurnal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)
- Agus Kurniawan. "Pelaksanaan PPKM dalam Penanganan Kasus COVID-19 dan Evaluasinya". <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14314/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan-Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya.html>. Diakses 14 Desember 2021. Pukul 21.00
- Arif Muttaqien, *Paradigma Baru Pemberantasan Kemiskinan, Rekonstruksi Arah Pembangunan Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan, Terbebaskan Dan Demokratis*, (Jakarta; Khanata Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), dikutip oleh Istiana Herawati, "Dampak Program Pengentasan Kemiskinan Dampak Program Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Jayapura", (Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan BP2P3KS Kementerian Sosial RI)
- Badan Pusat statistic Provinsi Lampung, Perkembangan Indikator Makro Sosial Ekonomi Lampung Triwulan IV-2020.
- Bank, W. (2021). Retrieved from <https://www.worldbank.org>
- BPS Provinsi Lampung. Dampak Covid 19: hasil survei sosial dan demografi Provinsi Lampung 2020.
- BPS Provinsi Lampung. "Kemiskinan". <https://lampung.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>. Diakses 12 Maret 2023
- <http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-enam-kebijakan-upaya-provinsi-lampung-dalam-mengantisipasi-dampak-ekonomi-covid19.html>
- https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/KMK_No._HK.01.07.MENKES4132020_ttg_Pedoman_Pencegahan_dan_Pengendalian_COVID-19.pdf. Diakses 10 November 2021
- <http://bappeda.lampungprov.go.id/berita-enam-kebijakan-upaya-provinsi-lampung-dalam-mengantisipasi-dampak-ekonomi-covid19.html>
- Burhan Ashafa, "Metode Penelitian Hukum", (Jakarta: Rineka Cipta, 2013)
- Diah Handayani, dkk. Penyakit Virus Corona 2019. *Jurnal Respirologi*. Vol.40. No 2 April 2020
- Endang Siti Rahayu dan Arbianti. Impact Of The Covid Pandemic On MSME Household Income And Poverty In The Keduang Watershed. *Jurnal Ilmiah Agribisnis (Jimanggis)*. Vol.2.No.2. Desember 2021.
- IB Ilham Malik. Dampak Dan Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Multidisiplin. (Bandar Lampung:UBL Press.2020)
- Irfan Syaqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017)
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Diseases Covid 19, (Revisi 19. Jakarta: 2020)
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPM, 2016)
- M. P. Todaro and S. C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. (Jakarta: Erlangga, 2004)

Nursiah Chalid dan Yusbar Yusuf , *“Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau”*, (Jurnal Ekonomi) Volume 22. Nomor 22 Juni 2014,

Rosyita Darojati A’laa dan Sutikno, *Pemodelan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Gini Rasio Pembangunan di Jawa Timur dengan Regresi Spasial*. Jurnal Sains Dan Seni ITS Vol. 7, No. 2 (2018).h.265

Sudarman, *Positif Covid-19: Li fe Is Begin*. (Yogyakarta: Samudra Biru. 2021)

Sutaryo. *Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19)*, (Yogyakarta. Gadjah Mada University Press: 2020)

T. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

Wang Zhou, *The Corona Prevention Handbook..*(New York. Skyhorse Publishing.2020)

Viva Budy Kusnandar. *“Kemiskinan Lampung Meningkatkan Selama Pandemi Covid 19”*.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/29/kemiskinan-lampung-meningkat-selama-pandemi-covid-19>. Diakses 12 Desember 2021.